

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Perekonomian di suatu negara tercermin oleh kekuatan bisnis dalam negara tersebut. Bisnis yang sehat akan membawa kemajuan karena berkontribusi besar dalam perkembangan ekonomi sedangkan bisnis yang tidak bisa bertahan dalam persaingan akan mengalami kemunduran. Selain berfokus untuk mengejar keuntungan, keberadaan badan usaha di setiap negara juga berperan dalam memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Tentunya jika hal tersebut terpenuhi akan mendorong terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun kondisi perekonomian yang berkembang pesat dan akan mengalami perubahan setiap waktunya ditambah kemajuan teknologi akan mengakibatkan perubahan dalam dunia bisnis.

Adanya perekonomian yang buruk menjadi salah satu masalah serius bagi setiap entitas bisnis di mana akan berdampak bagi internal perusahaan dan terhadap finansial perusahaan tersebut. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi setiap entitas bisnis untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Sehingga perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya baik dari sisi manajemen perusahaan maupun kondisi keuangannya guna mengantisipasi adanya permasalahan yang timbul. Ketika perusahaan tidak mampu bersaing dan mengikuti perubahan yang ada, maka perusahaan akan menghadapi kesulitan keuangan dan dampak terburuknya mengalami kebangkrutan (Tyaga & Kristanti, 2020).

Perusahaan dapat dikatakan mengalami kebangkrutan apabila dalam jangka waktu tertentu terus berada di kondisi kesulitan keuangan (Adityaputra, 2022). Sehingga dibutuhkan adanya *early warning system* untuk mengetahui dan mengantisipasi sebelum terjadi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan. *Financial distress* merupakan penurunan kondisi keuangan secara berturut-turut, di mana tahap ini terjadi sebelum perusahaan mendapati kemungkinan kebangkrutan atau likuidasi (Platt & Platt, 2002). Kondisi perusahaan ketika mengalami *financial*

*distress* bisa dianalisis melalui kinerja keuangan perusahaan dalam laporan keuangannya. Umumnya kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan diawali dari adanya tekanan likuiditas yang semakin tinggi. Kemudian dilanjutkan adanya kondisi aset yang menurun sehingga mengakibatkan perusahaan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya (Liahmad *et al*, 2021).

Melansir data sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dari lima pengadilan niaga (PN), terjadi peningkatan kasus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sepanjang tahun 2021 sebanyak 732 kasus di mana sebelumnya hanya tercatat 637 kasus (Kontan, 2022). Peningkatan ini terjadi karena banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban utangnya secara tepat waktu. Perusahaan sektor infrastruktur Mitra Pemuda Tbk dengan kode saham MTRA menjadi salah satu daftar emiten yang terjerat kasus PKPU dan diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tanggal 9 November 2020 dan terancam *delisting* atau dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh perusahaan yang mengalami kerugian sebesar Rp75,06 miliar akibat permasalahan yang terjadi dalam proyek pembangunannya (CNBC Indonesia, 2020).

Kinerja keuangan Mitra Pemuda Tbk selama dua periode terakhir juga terlihat tidak sehat di mana laba bersih perusahaan menunjukan nilai negatif atau defisit. Pada tahun 2019 defisit sebesar Rp11,1 miliar, tahun 2020 defisit sebesar Rp91,1 miliar dan pada kuartal ketiga 2021 sebesar Rp6 miliar. Sehingga bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara saham MTRA dan berdasarkan No. Peng-00016/BEI.PP1/10-2021 tanggal 4 Oktober 2021, BEI mengumumkan bahwa saham Mitra Pemuda Tbk sudah disuspensi selama 18 bulan, yang di mana masa suspensi bisa mencapai 24 bulan di tanggal 31 Agustus 2022.

**Tabel 1. Kinerja PT Mitra Pemuda Selama 2018-2020 (dalam Rupiah)**

Tahun	Utang	Ekuitas	Pendapatan	Laba Bersih
2018	216.511.486713	113.028.172.659	292.290.640.713	(20.927.196.797)
2019	222.486.283630	101.123.253.799	343.283.077.876	(11.085.139.491)
2020	258.404.663.054	9.872.539.022	132.196.198.859	(91.096.262.848)

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah)

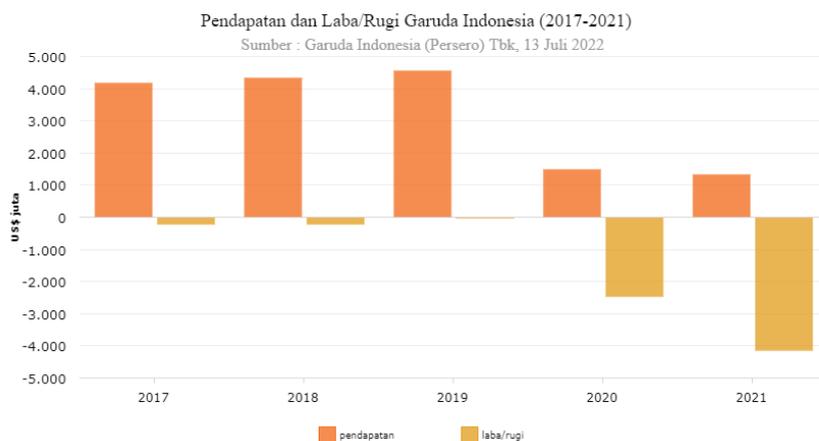
Benita Salsabila Beno, 2023

PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TERHADAP FINANCIAL DISTRESS

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Kasus perusahaan besar yang terancam pailit lainnya juga terjadi pada salah satu sektor transportasi, yaitu Garuda Indonesia. Hal ini bermula dari liabilitas perusahaan yang membengkak hingga Rp70 triliun pada pertengahan tahun 2021. Mengutip dari CNBC Indonesia, tumpukan utang tersebut berasal dari beban sewa pesawat atau *leasing* pada tahun-tahun sebelumnya yang di mana tidak disajikan sesuai ketentuan pada laporan keuangannya (Binekasri, 2022). Kinerja keuangan perusahaan ini memang sudah tidak sehat beberapa tahun terakhir. Mulai dari pendapatan yang menurun, laba yang defisit, hingga sulitnya membayar kewajibannya karena kas tidak cukup menutupinya. Berdasarkan gambar 1.1 Garuda mengalami penurunan pendapatan dan defisit lima tahun terakhir. Salah satunya pada tahun 2021 Garuda mengalami defisit sebesar Rp62,3 triliun serta mengalami ekuitas negatif senilai Rp91,65 triliun. Kemudian pada 9 Desember 2021 Garuda ditetapkan dalam status PKPU, walaupun dibebaskan dari kebangkrutan saham emiten GIAA tetap disuspensi oleh BEI dan berpotensi dikeluarkan dari bursa atau *delisting*.



**Gambar 1. Pendapatan dan Laba/Rugi Garuda Indonesia (2017-2021)**

Sumber Gambar: <https://databoks.katadata.co.id>

Kasus yang menimpa perusahaan Garuda Indonesia tidak lepas dari adanya *miss management* dan penerapan tata kelola perusahaan yang buruk. Berdasarkan pernyataan dari Kementerian BUMN yang dikutip dari CNBC Indonesia, *miss management* yang terjadi antara lain berupa harga sewa pesawat yang melebihi harga rata-rata pasar dan manajemen rute penerbangan yang tidak efisien. Ditambah

juga adanya budaya buruk seperti korupsi atau permainan uang dari para *stakeholder* di Garuda Indonesia demi menguntungkan pribadi. Salah satunya adanya penyalahgunaan jabatan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia, di mana melakukan penyeludupan barang impor. Temuan ini semakin memperkuat buruknya *corporate governance* di perusahaan Garuda Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, strategi bisnis dan manajemen perusahaan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam memengaruhi kondisi *financial distress* di perusahaan.

Strategi perusahaan dalam menangani terjadinya *financial distress* dapat ditentukan dari penerapan *corporate governance*. Hal ini sesuai dengan penelitian Sa'diah & Utomo (2021) yang menjelaskan bahwa penyebab perusahaan mengalami kondisi *financial distress* bisa dipahami melalui praktik tata kelola perusahaan. *Corporate governance* bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mengarahkan bagaimana hubungan antara pihak internal dan eksternal dari suatu perusahaan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. *Corporate governance* berperan dalam mengarahkan dan mengendalikan perusahaannya agar tercapai keseimbangan antar kekuasaan ketika memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Widhiastuti *et al*, 2019).

Perusahaan di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik maupun yang dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini terlihat dari adanya SK Menko Ekuin No. Kep-10 M.EKUI/08/1999 mengenai pembentukan Komite Nasional *corporate governance* yang bertujuan untuk menyusun *code for good corporate governance* (CGCG) untuk dijadikan acuan perusahaan di Indonesia. Namun hingga memasuki abad ke-21 penerapan *Good Corporate Governance* masih tergolong lemah dan menjadi permasalahan di berbagai korporasi di Indonesia. Hasil survei *Asean Corporate Governance Association* (ACGA), ranking penerapan GCG di Indonesia menempati urutan bawah dari 12 negara di ASEAN. Menurut berita pada Media Indonesia (2021) menyatakan bahwa GCG di Indonesia masih menjadi kendala yang harus segera dibenahi.

Pembentukan tata kelola perusahaan bertujuan sebagai kerangka kerja yang mengawasi pengelolaan perusahaan dan membantu meminimalisir adanya konflik

Benita Salsabila Beno, 2023

PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TERHADAP FINANCIAL DISTRESS

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kepentingan dalam internal perusahaan (Indrati & Handayani, 2022). Perusahaan yang melaksanakan tata kelola yang baik dapat menguntungkan bagi perusahaannya, contohnya dapat membangun dan memperluas hubungan dengan para pemangku kepentingan, mewujudkan perbedaan dengan para pesaingnya, membangun perusahaan yang berkinerja tinggi, serta yang lainnya. Sebaliknya struktur tata kelola perusahaan yang lemah akan mengarah kepada kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan maupun *financial distress* (Indarti *et al*, 2020)

Kepemilikan manajerial menjadi salah satu elemen penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen, direksi, serta dewan komisaris yang aktif pada pengambilan keputusan perusahaan (Loman & Melelak, 2015 dalam Utami & Dirman, 2022). Menurut Putri & Kristanti (2020) adanya kepemilikan saham oleh manajerial mampu meningkatkan kinerja operasional manajemen dan mengurangi tindakan kecurangan yang dapat merugikan perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila proporsi saham manajerial semakin besar maka akan menunjukkan pengaruh dominan dalam mengawasi kinerja perusahaan sehingga mengurangi terjadinya *financial distress* (Laksmiwati *et al*, 2022). Penelitian yang dilakukan Widhiadnyana & Ratnadi (2019), Maryam & Yuyetta, (2019) dan Santoso & Nugrahanti (2022) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*. Sedangkan dalam penelitian Romadona *et al* (2022), kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Hariyani & Kartika (2021) serta Yusra & Bahtera (2021) yang mengatakan bahwasannya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap terjadinya *financial distress*.

Implementasi *corporate governance* untuk penguatan internal manajemen perusahaan juga dapat dilihat dari adanya komite audit di perusahaan tersebut. Komite audit dibentuk dengan anggotanya yang dipilih serta diberhentikan, yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris perusahaan. Keberadaan komite audit memberikan kontribusinya kepada direksi dalam memenuhi tanggung jawab pribadinya, seperti penyelesaian proses audit tahunan, menjamin kualitas

sistem pelaporan, pengendalian keuangan serta sebagai penghubung antara dewan dan manajemen perusahaan (Indrati & Handayani, 2022). Salah satu karakteristik yang harus dimiliki komite audit yaitu terdapat minimal 1 anggota yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Menurut Masak & Noviyanti (2019) kompetensi yang dimiliki komite audit diindikasikan bisa mengontrol keuangan perusahaan dan melakukan *review* terhadap keuangan perusahaan untuk menjauhkan perusahaan dari kondisi kesulitan keuangan. Hasil dari penelitian Nurhayati *et al* (2019), Nursiva & Widyarningsih (2020), serta Rustyaningrum & Rohman (2021) menjelaskan bahwasannya terdapat pengaruh negatif signifikan antara kompetensi komite audit terhadap *financial distress*. Hasil tersebut tidak selaras dengan penelitian Siagian & Siagian (2021) dan Maghfiroh & Isbanah, (2020) yang menunjukan kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Selain melalui mekanisme tata kelola perusahaan, *financial distress* juga bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan ekonomi makro negara tersebut (Alfiah & Musdholifah, 2018). Meskipun perusahaan memiliki kebijakan bisnis tersendiri tetapi sebagian besar hasil bisnis perusahaan tersebut baik dalam hal biaya, penjualan, pendapatan, dan prospek usaha ke depan ditentukan oleh keseluruhan kondisi makroekonomi yang berlaku di perekonomian negaranya (Sehgal *et al*, 2021). Dalam hal ini indikator ekonomi makro misalnya inflasi dan suku bunga diduga memberikan pengaruh terhadap kondisi perusahaan.

Inflasi merupakan kondisi meningkatnya harga barang di pasar secara terus menerus. Berdasarkan data statistik bps.go.id inflasi di Indonesia mengalami kenaikan hingga menyentuh angka 4,94% di kuartal II bulan Juli tahun 2022. Di mana pada tahun 2020 dan 2021 hanya menunjukan 1,68% dan 1,87%. Tingkat inflasi di tahun 2022 menjadi yang tertinggi sejak tahun 2017 (katadata.co.id, 2022). Tingginya tingkat inflasi dapat mengakibatkan harga-harga di pasar meningkat, sehingga individu sulit atau tidak mampu untuk membeli sesuatu barang. Hal ini berdampak pada penurunan penjualan perusahaan dan apabila perusahaan tidak mampu menutup kerugiannya, maka kemungkinan terburuknya perusahaan akan mengalami kondisi *financial distress* (Sandi & Amanah, 2020).

**Benita Salsabila Beno, 2023**

**PERAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE DAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO TERHADAP FINANCIAL DISTRESS**

UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sementara itu suku bunga merupakan harga atas penggunaan uang yang dinyatakan dalam persentase. Tingkat suku bunga sendiri menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu atau tidak konstan. Ulaya & Nurfauziah (2022) menjelaskan bahwa tingginya tingkat suku bunga akan menaikkan beban perusahaan dan menyebabkan laba perusahaan yang lebih rendah sehingga perusahaan akan menghadapi kesulitan keuangan.

Sebagian besar rasio akuntansi yang tersedia di laporan keuangan perusahaan tergantung pada kondisi makroekonomi yang berlaku. Sehingga diperlukan eksplorasi mengenai indikator-indikator ekonomi makro dalam menentukan dan memperkirakan kesulitan keuangan. Pada penelitian sebelumnya, Tyaga & Kristanti (2020), Mashudi *et al* (2021) dan Muien *et al* (2022) mengungkapkan bahwa inflasi dapat memengaruhi *financial distress* dengan arah positif. Pada penelitian Nadia *et al* (2022) menjelaskan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Namun penelitian Kholisoh & Dwiarti (2020) dan Priyatnasari & Hartono (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yakni inflasi tidak cukup memengaruhi *financial distress*. Kemudian pada penelitian yang dilakukan Wafi *et al* (2021), Refni *et al* (2021) dan Elia *et al* (2021) menyatakan bahwasannya tingkat suku bunga mampu berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan Susdaryo *et al* (2021) menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan milik Kholisoh & Dwiarti (2020) dan Priyatnasari & Hartono (2019) di mana menjelaskan bahwasannya tingkat suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan fenomena serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka mampu memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *corporate governance* dan indikator makro ekonomi terhadap *financial distress*. Studi ini dilakukan karena sebagian besar penelitian sebelumnya mengenai kesulitan keuangan hanya berfokus pada peran internal perusahaan dan faktor keuangan perusahaan. Perbedaan pada studi sebelumnya yaitu penulis menambahkan variabel komite audit sebagai komponen GCG dalam internal perusahaan dan menambah variabel inflasi sebagai indikator ekonomi

makro. Selain itu penggunaan proksi ‘Altman *Z-score* modifikasi’ untuk variabel *financial distress*, serta menggunakan data laporan keuangan pada sektor infrastruktur, transportasi dan logistik tahun 2019-2021. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejenis dengan judul “**Peran Mekanisme Corporate Governance dan Indikator Ekonomi Makro terhadap Financial Distress**”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI?
3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI?
4. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji pengaruh inflasi terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji pengaruh suku bunga terhadap *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik yang terdaftar di BEI.

## I.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan kontribusi menjadi bahan masukan bagi pengembangan di bidang penelitian dan literatur akuntansi, serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, serta masukan instansi dalam mengetahui pentingnya peran GCG dan indikator ekonomi makro berpengaruh terhadap *financial distress*.

#### b. Bagi Entitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembuatan keputusan operasional perusahaan dan keputusan investasi terhadap pengaruh pengungkapan mekanisme *corporate governance* dan indikator ekonomi makro dalam *financial distress* pada perusahaan sektor infrastruktur, transportasi dan logistik.

#### c. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai keadaan perusahaan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi investor sebelum memutuskan melakukan investasi.

#### d. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan, pemerintah dapat mengetahui dan memahami penyebab terjadinya *financial distress*, sehingga pemerintah dapat ikut serta untuk mencari solusi dalam hal mencegah *financial distress*.

#### e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa memperbanyak pengetahuan serta pemahaman yang baru kepada peneliti mengenai kondisi *financial distress* pada perusahaan infrastruktur, transportasi dan logistik.